

Status Kepemilikan Objek Jaminan Pada Hak Tagih Atas Piutang Dan Peran Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Perbankan (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2971K/PDT/2019) = Ownership Status Of Collateral Object On The Collection Rights And The Role Of Notary At Credit In Buy And Sell Agreement of Credit (Cessie) Banking (Case Studies Of Supreme Court Verdict Number 2971K/PDT/2019)

Reyhan Shahreza Pahlevi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920556065&lokasi=lokal>

Abstrak

Notaris merupakan profesi penunjang bagi perbankan dalam hal pembuatan akta otentik, salah satunya adalah Perjanjian Pengalihan Piutang secara (cessie) perbankan. Cessie adalah cara yang dapat dilakukan oleh bank selaku pemilik piutang apabila berkeinginan mundur sebagai kreditur dengan mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai status kepemilikan objek jaminan pada hak tagih atas piutang dalam perjanjian pengalihan piutang secara cessie yang dieksekusi oleh kreditur baru dan penerapan peran notaris sebagai profesi penunjang dalam hal pembuatan akta otentik berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2971K/PDT/2019. Dalam menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan tipe penelitian preskriptif. Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut dapat ditarik simpulan bahwa dalam perjanjian pengalihan piutang secara cessie hak-hak atas piutang termasuk hak tagih dan hak untuk mengeksekusi akan beralih kepada kreditur baru. Kepemilikan objek jaminan yang diberikan oleh nasabah selaku debitur dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara eksekusi atas jaminan tersebut oleh kreditur baru dikarenakan telah beralih Hak Tanggungan kepadanya. Notaris mempunyai peran untuk menanyakan kepada para penghadap (kreditur lama dan kreditur baru) apakah telah memberitahukan kepada debitur perihal perjanjian pengalihan secara cessie tersebut, yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang akan dibuatnya. Oleh karena itu, penulis menyarankan perjanjian pengalihan piutang secara cessie harus dilakukan sesuai dengan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar memiliki akibat hukum bagi debitur. Notaris sebaiknya menyarankan untuk dimuatnya pasal perihal pemberitahuan kepada debitur dalam isi akta.

.....Notary is a supporting profession in banking in terms of making authentic, one of them is the Deed of Receiveable Sale and Purchase Agreement and the Deed of Receivable Transfer Agreement (Cessie). Cessie is a method that can be done by the bank as the owner of the receivables if it wishes to resign as a creditor by transferring its receivables to a third party. The problem raised in this study is regarding the ownership status of the object of collateral on the right to collect receivables in the cessie transfer agreement in the Supreme Court Decision Number 2971K/PDT/2019. In the need of answering these problems, the research method used in this research is normative juridical research that uses primary, secondary, and tertiary legal materials with prescriptive research typology. Based on the results of the analysis of the case, it can be concluded that in the cessie agreement for the transfer of receivables the rights to the receivables including the right to collect and the right to execute will be transferred to the new creditor, the ownership of the

object of collateral provided by the customer as the debtor can be transferred to another party by way of execution. on the guarantee by the new creditor due to the transfer of Mortgage Rights to him. Notaries have a role to ask the parties (old creditors and new creditors) whether they have notified the debtor about the cessie transfer agreement, which aims to provide legal counseling regarding the deed to be made. Therefore, the authors suggest that the cessie transfer of receivables agreement must be carried out in accordance with Article 613 of the Civil Code in order to have legal consequences for the debtor. The notary should suggest or advised the inclusion of an article regarding notification to the debtor in the contents of the deeds.